

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian *collaborative governance* pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan didasari atas permasalahan pengelolaan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang belum optimal, adapun kawasan tersebut merupakan pusat budaya Betawi terbesar di DKI Jakarta. Dari permasalahan tersebut terindikasi kurangnya kolaborasi antar stakeholder dalam mendukung Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai destinasi wisata.

1. Analisis faktor-faktor penghambat *collaborative governance regime* pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
 - a. Sistem konteks
 - 1) Aksesibilitas, kondisi infrastruktur fasilitas tidak terawat dan hospitality yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat.
 - 2) Masih kurangnya regulasi komprehensif yang mengatur hubungan kerja antar perangkat daerah dan mengakomodir kerjasama.
 - 3) Kurangnya komunikasi antara pemerintah, dengan aktor lainnya
 - 4) Ketidakpastian politik /pergantian pemimpin.
 - 5) Koordinasi antar-aktor masih bersifat informal dan sering mengandalkan komunikasi pribadi.
 - 6) Peran sektor swasta dalam jaringan ini masih terbatas pada kontribusi jangka pendek.
 - 7) Ketidakmampuan pemerintah untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat.
 - 8) Seringkali tidak ada tindak lanjut yang jelas upaya pemerintah dalam merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat.

- 9) Kurangnya struktur formal yang mengikat dan tanpa dasar perjanjian tertulis. Beberapa dukungan dari stakeholder hanya sebatas pada kegiatan tertentu.

b. Analisis dimensi faktor pendorong/ *drivers*

Ketidak adaan regulasi formal yang secara tegas menetapkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, UMKM, masyarakat lokal, dan lembaga budaya Betawi. Ketiadaan aturan ini menyebabkan interaksi dan komunikasi lebih banyak bertumpu pada jaringan pribadi, menciptakan ketergantungan pada relasi informal daripada mekanisme komunikasi yang terstruktur. Hal ini mengakibatkan partisipasi yang terbatas karena akses informasi dan keterlibatan sering kali hanya berada di lingkaran individu-individu tertentu.

Faktor lain yang memengaruhi adalah seringnya perubahan kebijakan dan adaptasi sementara, yang menunjukkan lemahnya landasan hukum untuk pengembangan Setu Babakan, sehingga prioritas dan arah pengembangan kerap kali berubah. Tanpa aturan formal yang mengikat, arahan kolaborasi sering kali hanya bersifat verbal dan tertulis tanpa tindak lanjut yang konsisten. Selain itu, inisiatif kolaborasi cenderung tergantung pada figur pimpinan tertentu, sehingga ketika tokoh kunci tersebut absen atau mengalami perubahan peran, arah kolaborasi dapat terhenti atau kehilangan kejelasan.

Pendekatan *top-down* yang dominan dari pemerintah dalam menginisiasi program pengembangan sering kali membatasi ruang partisipasi stakeholder lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini kurang mendukung prinsip CGR yang menitikberatkan pada kolaborasi sejajar dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dalam pandangan Emerson dan Nabatchi, kolaborasi efektif membutuhkan keterlibatan yang merata dan komunikasi yang terbuka antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, Setu Babakan membutuhkan regulasi formal yang tidak hanya menetapkan peran setiap pihak tetapi juga

mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kolaborasi dapat berjalan lebih konsisten dan mengurangi ketergantungan pada figur individu, menciptakan keberlanjutan pengembangan destinasi secara lebih baik.

c. Dinamika kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

Tantangan utama yang mempengaruhi kolaborasi adalah ketergantungan pada pola komunikasi informal tanpa adanya forum formal untuk dialog rutin. Ketiadaan forum menghambat interaksi yang terstruktur dan transparan, komunikasi cenderung terbatas pada individu-individu tertentu, sehingga pengambilan keputusan kolektif menjadi sulit dan ruang untuk berbagai ide dari beragam pihak menjadi terbatas.

Selain itu, inisiatif kolaboratif belum didukung dengan pendanaan yang memadai dan kepemimpinan yang kuat, sehingga ide atau program pengembangan destinasi tidak dapat direalisasikan secara optimal. Emerson dan Nabatchi menekankan bahwa dukungan anggaran dan kepemimpinan merupakan elemen kunci keberhasilan kolaborasi jangka panjang. Tanpa dukungan ini, inisiatif yang muncul rentan terhenti karena kekurangan sumber daya atau arahan yang memastikan kelangsungan program. Ketiadaan Memorandum of Understanding (MoU) juga menjadi kendala dalam membangun kemitraan jangka panjang yang solid. MoU berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat komitmen semua pihak dan memberikan kejelasan tentang tanggung jawab masing-masing. Tanpa MoU, kolaborasi di Setu Babakan cenderung bersifat sementara dan tidak memiliki dasar formal yang kuat, sehingga rentan terhadap perubahan atau gangguan eksternal.

Minimnya struktur formal dan kurangnya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab menurunkan semangat kolaborasi, karena setiap pihak tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai peran mereka

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi. Hal ini sering menyebabkan tumpang tindih tugas atau bahkan pengabaian tanggung jawab, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja sama.

Pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal menghambat upaya menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik Setu Babakan. Infrastruktur yang ada seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung aktivitas pariwisata, mendukung forum koordinasi dan dialog serta meningkatkan pengalaman pengunjung, namun kurangnya koordinasi dan perencanaan menyebabkan potensi infrastruktur tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya.

2. Strategi *Collaborative Governance* pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
 - a. Membentuk Tim Kerja Kolaboratif atau Forum Koordinasi Tata Kelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
 - b. Membentuk kerjasama dan disertai Memorandum of Understanding (MoU) Penataan Fasilitas Destinasi Wisata dan Pengembangan SDM pengelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
 - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Koordinasi Sektor Pendukung Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Atraksi Wisata Setu Babakan.
 - d. Mengadakan forum diskusi atau lokakarya Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
 - e. Mengembangkan platform digital promosi wisata budaya Betawi.
 - f. Meningkatkan prioritas status pengembangan destinasi dan pembangunan destinasi wisata melalui penyusunan masterplan Perkampungan Budaya Betawi.

Hasil dari kolaborasi adalah peningkatan kepercayaan antar pihak, efektivitas dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang konsisten, serta hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang efisien. Dalam proses adaptasi, strategi promosi wisata diperbaharui, tujuan kolaborasi disesuaikan dengan perkembangan, dan platform digital digunakan sebagai alat interaktif yang terintegrasi. Diperlukan adaptasi terkait perubahan strategi promosi, tujuan kolaborasi disesuaikan untuk tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Umpan balik digital dari pengunjung digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan program. Serta untuk menghadapi risiko pergantian kepemimpinan atau kebijakan, langkah mitigasi seperti kebijakan jangka panjang, penguatan SDM, dan evaluasi rutin diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan sejumlah saran yaitu

- a. Inisiasi DKI Jakarta sebagai kota global juga membutuhkan penguatan wisata Budaya, sehingga peran destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sudah mulai diperhitungkan dan perlu mendapat perhatian dalam program promosi wisata di DKI Jakarta. Penting bagi pemerintah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di lingkup DKI Jakarta dan stakeholder terkait untuk membuka dialog transparan dengan masyarakat terkait wisata budaya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
- b. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu memfasilitasi adanya peraturan yang lebih kuat dan kesepakatan formal untuk menjadi dasar kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, sehingga tidak hanya mengandalkan instruksi lisan atau inisiatif sesaat dari masing-masing stakeholder. serta menetapkan

masterplan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan agar dapat menjadi salah satu dokumen regulasi untuk mendorong kolaborasi;

- c. Dinas Kebudayaan bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, perlu menyediakan forum atau platform kolaboratif yang terstruktur, di mana setiap pemangku kepentingan dapat terlibat secara aktif untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi terkait pengembangan wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Komunikasi aktif dan forum terbuka untuk memberi masukan dalam pengembangan pariwisata khususnya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan pelibatan media sangat mempengaruhi pengenalan Setu Babakan sebagai destinasi budaya di DKI Jakarta.
- d. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan adalah kebanggaan bagi Indonesia, khususnya provinsi DKI Jakarta. Setu Babakan sebagai etalase kebudayaan Betawi ditengah hiruk pikuk modernisasi dan wisata modern sehingga diperlukan peran dan partisipasi stakeholder untuk mendorong pembangunan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
- e. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis model kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, mengingat dalam kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa menyebutkan dalam Pelaksanaan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat. sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap peran aktor aktor terkait lainnya; media, akademisi, Lembaga Budaya Betawi dan pemerintah pusat yang dapat mendorong pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya Betawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R. (2023). Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments. In *Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments*.
<https://doi.org/10.1353/Book13050>
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2).
<https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2022.008.02.5>
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi Di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Fisipublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2). <https://doi.org/10.24903/Fpb.V4i2.748>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariesmansyah, A., Hari, R., Ariffin, B., & Respati, L. A. (N.D.). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata*.
- Barandiarán, X., Restrepo, N., & Luna, Á. (2019). *Collaborative Governance In Tourism : Lessons From Etorkizuna Eraikiz In The Basque Country , Spain. August*. <https://doi.org/10.1108/Tr-09-2018-0133>
- Bintoro, T. (2006). Pengantar Administrasi Pembangunan. In *Jakarta: Lp3es*.
- David Greisler, Ronald J. Stupak - *Handbook Of Technology Management In Public Administration (Public Administration And Public Policy) (2006)*. (N.D.).
- Dayanti¹, E. S., & Zaenuri², M. (N.D.). *Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus : Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung)*.
- Dr. Mgs. H Nazarudin, M. (2020). Manajemen Startegik. In *Noerfikri Offset*.
- Dye, T. R., Columbus, B., New, I., San, Y., Cape, F. A., Dubai, T., Madrid, L., Munich, M., Montréal, P., Delhi, T., São, M. C., Sydney, P., Kong, H., Singapore, S., & Tokyo, T. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. www.pearsoned.com/permissions/.
- Edo, I. K., Susila, W., & Pramono, J. (2020). Daya Tarik Wisata Di Pura Tanah Lot Tabanan Bali Indonesia. *Jurnal.Undhirabali*, November, 419–430.
- Efendi, M., & Astuti, S. J. W. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1.
- Eko Wijoyo, A., & Sri Rahayu, N. (N.D.). *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Politeknik Stia*

- Lan Jakarta, Kota Jakarta Abstrak*. <https://E-Journal.Naureendigiton.Com/Index.Php/Mj>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/Padm.12278>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mur011>
- Fyall, A., Legohérel, P., Frochot, I., & Wang, Y. (2019). International Marketing Strategy. In *Marketing For Tourism And Hospitality*. <https://doi.org/10.4324/9781315651026-27>
- Gantemur, D. (2020). Nomadic Tourism: Stakeholder Collaboration Management For Tourism Development In Mongolia. *Proceedings Of The Mongolian Academy Of Sciences*. <https://doi.org/10.5564/Pmas.V60i3.1426>
- Handayani, S., Khairiyansyah, & Nanang, W. (2019). Fasilitas, Aksesibilitas Dan Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/Jimb.V20i2.3228>
- Hjalager, A. M. (2002). Repairing Innovation Defectiveness In Tourism. *Tourism Management*, 23(5), 465-474.
- Indrayani, I. A. D., Prabawati, N. P. A., & Yudartha, I. P. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar). *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(1). <https://doi.org/10.61292/Eljbn.151>
- Inskip, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated And Sustainable Development Approach Van Nosttrand Reinhold. In *New York. Usa*.
- Itah Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6.
- Karsafman, T., & Iqbal, M. (2016). Strategi Peningkatan Jumlah Pelanggan Lcl Impor. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, Vol.2 No 2 Januari 2016, 2(2).
- Kasim, S., Murianto, M., & Satria, C. (2020). Perancangan Media Promosi Desa Sintung Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(1). <https://doi.org/10.47492/Jip.V1i1.45>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance And Rural Community Development In Finland: The Case Of Vuonislahti. *Journal Of Travel Research*, 57(4). <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Kotler, P., Bowen, J. T., & Baloglu, S. (2022). Marketing For Hospitality And Tourism, Global Edition. In *Pearson*.

- Kurniati, P. S. (2021). Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Atraksi Wisata Air Mancur Sri Baduga. *Journal Of Tourism And Economic Vol.3, No.2, 2020, Page 104-112*.
- Li, X., Kim, J. S., & Lee, T. J. (2021). Collaboration For Community-Based Cultural Sustainability In Island Tourism Development: A Case In Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13).
<https://doi.org/10.3390/Su13137306>
- Maulana, D. (2019). *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. <https://www.researchgate.net/publication/335612363>
- Min, H., & Yu, W. Bin. (2008). Collaborative Planning, Forecasting And Replenishment: Demand Planning In Supply Chain Management. *International Journal Of Information Technology And Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1504/Ijitm.2008.015886>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2).
<https://doi.org/10.33701/Jipsk.V6i2.1790>
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (N.D.). *The Oxford Handbook Of*.
- Moreta, A., & Harirah Ms, Z. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan Pada Tahun 2021-2022. *Journal Of Social And Policy Issues*.
<https://doi.org/10.58835/Jspi.V3i3.180>
- Morrison, A. M. (2023). Marketing And Managing Tourism Destinations: Third Edition. In *Marketing And Managing Tourism Destinations: Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781003343356>
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). Rpjmn 2020-2024. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*.
- Nguyen, H. Van, Diane, L., & Newsome, D. (2020). Kinh And Ethnic Tourism Stakeholder Participation And Collaboration In Tourism Planning In Sapa, Vietnam. *International Journal Of Culture, Tourism, And Hospitality Research*, 14(4). <https://doi.org/10.1108/Ijcthr-12-2018-0179>
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriliyani. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business And Investment Review*, 2(1).
<https://doi.org/10.61292/Birev.92>
- Oecd. (2022). *Japan | Oecd Tourism Trends And Policies 2020 | Oecd Ilibrary*. www.oecd-ilibrary.org.
- Patadjenu, S., Sondang Silitonga, M., & Asropi, A. (2023). *Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara Tourism Development Collaborative Governance Of Likupang, North Minahasa Regency*.

- Pilving, T., Kull, T., Suškevics, M., & Viira, A. H. (2022). Diverse Networks In Regional Tourism: Ties That Foster And Hinder The Development Of Rural-Urban Tourism Collaboration In Estonia. *European Journal Of Tourism Research*, 30. <https://doi.org/10.54055/Ejtr.V30i.2596>
- Pitana, I. G., & Putra, I. G. S. A. (2013). Pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak Dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar Dalam Pariwisata. *Jurnal Kajian Bali*, 03(02).
- Ppri. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. *Galang Tanjung*, 2504.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.55623/Au.V2i1.18>
- Russo, N. E., & Darmohraj, A. (2016). Public-Private Collaboration In Tourism. Institutional Capacities In Local Tourism Management Partnerships In Argentina. *Reforma Y Democracia*, 2016-June(65).
- Santika, R. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatdibidang Simpan Pinjam Di Desa Loloankecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utaratahun 2018-2019. *Journal Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges And Successes In Collaborative Tourism Governance: A Systematic Literature Review. In *European Journal Of Tourism Research* (Vol. 33). <https://doi.org/10.54055/Ejtr.V33i.2669>
- Seran, M. Y., Hutagalung, S., Rudyanto, R., Sandrio, L., & Rostini, I. A. (2023). Analisis Konsep 3a (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) Dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Umatoos, Kabupaten Malaka). *Jptm: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 1(1), 27–42.
- Sharpley, R. (2009a). Tourism, Development And The Environment. In *Tourism And Development: Concepts And Issues*, 2nd Edition.
- Sharpley, R. (2009b). Tourism Development And The Environment: Beyond Sustainability? In *Tourism Development And The Environment: Beyond Sustainability?* <https://doi.org/10.4324/9781849770255>
- Sharpley, R. (2017). Rural Tourism And Sustainability - A Critique. In *New Directions In Rural Tourism*. <https://doi.org/10.4324/9781315248097-15>
- Sharpley, R. (2022). Tourism And Development Theory: Which Way Now? *Tourism Planning And Development*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.2021475>
- Sianipar, A. F. (2019). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 260–267. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2019.005.03.1>

- Sinaga, I. C. (2021). Collaborative Governance In Tourism Development In Indonesia: Study Of South Sumatera Province. *Journal Of Public Administration And Governance*, 11(3).
<https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18747>
- Sri Rahayu, N., & Marsha, A. (2023). *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 12, Issue 04).
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3495>
Sukses Desa Wisata 1123-2350-1-Sm. (N.D.).
- Suwena, I Ketut Dan Widyatmaja, I. G. N. (2017). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Denpasar. In *Pustaka Larasan*.
- Swarbrooke, J. (2002). Development And Management Of Visitor Attractions. *Development And Management Of Visitor Attractions*.
- Tanrisevdi, A., Ozdogan, O. N., Acar, V., & Kilicdere, S. (2021). Destination Management: Right Or Wrong Measures. *Journal Of Global Business Insights*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1137>
- The Collaboration Of Companies In The Tourism Sector For Solving Sustainability Issues*. (N.D.).
<https://www.researchgate.net/publication/360223666>
- Undang-Undang Kepariwisataan. (2010). Undang-Undang Kepariwisataan. *Regulasi*.
- Viju, A., John, D., & Student, Mp. (2020). Study On Stakeholder Collaboration And Heritage Tourism Management [1]. In *International Journal Of Science, Engineering And Management (Ijsem)* (Vol. 5).
- Ys, M., Fajri, R., & Asropi. (2024). Analysis Of Collaborative Governance For The Development Of Betawi Village Tourism In Setu Babakan, South Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Perhotelan*, 4, 18–28.
- Zavaleta Chavez Arroyo, F. O., Sánchez Pantaleón, A. J., Aldea Roman, C. E., Esparza-Huamanchumo, R. M., & Álvarez-García, J. (2024). A Structural Analysis Of The Economic Impact Of Tourism And The Perspective Of Tourism Providers In Kuélap, Peru. *Land*, 13(1).
<https://doi.org/10.3390/Land13010120>